

PERAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN MELALUI MEDIASI TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN ROKAN HILIR

Bahrul¹; Dini Onaisis²; Rizqa Anita³

Magister Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581
E-mail : bahrul@gmail.com (Koresponding)

Abstract: This study aims to analyze the role of Inspectorate supervision on financial accountability through mediation of regional governance in Rokan Hilir Regency. Public financial accountability is the main focus in efforts to create transparent and accountable governance, while internal supervision by the Inspectorate plays a strategic role in ensuring the implementation of financial management in accordance with applicable regulations. This study uses a quantitative approach with data collection techniques through the distribution of questionnaires to relevant regional government officials. The data analysis method is carried out using the Structural Equation Modeling (SEM) approach to test the direct and indirect relationships between variables. The results show that Inspectorate supervision has a significant effect on regional governance, and good governance plays a mediating role that strengthens the relationship between Inspectorate supervision and financial accountability. These findings emphasize the importance of improving the internal supervision function and implementing good governance principles to realize accountable regional financial management.

Keywords: *Inspectorate Supervision, Financial Accountability, Governance*

Pengawasan merupakan suatu bentuk pengendalian yang memastikan bahwa semua aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan jalur yang telah direncanakan. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja memperbaiki kelemahan. Henry Fayol dalam (Novita, 2019)

Lembaga pengawas internal yang memiliki mandat untuk menjaga akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan adalah inspektorat. Menurut (Tuidano et al., 2017) Inspektorat daerah merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah yang memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan, baik di Provinsi maupun di Kabupaten dan Kota diatur Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia No. 57 Tahun 2007

Inspektorat Daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk mengungkapkan potensi penyimpangan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan tindak lanjut terhadap penyelesaian atas rekomendasi yang telah diberikan. Namun, peran pemberi konsultasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan belum mencapai hasil yang optimal.

Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir memiliki tugas utama untuk mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, pembinaan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tugas lainnya seperti kegiatan audit intern, pada saat ini tidak sekedar audit keuangan, audit ketaatan dan audit kinerja, tetapi perhatian lebih ditujukan pada semua aspek yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan pengendalian manajemen serta

memerhatikan aspek risiko bisnis/manajemen.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Inspektorat Daerah merupakan Lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Kebijakan untuk mewujudkan *good governance* pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian Pengawasan Inspektorat Akuntabilitas Laporan Keuangan beserta Tata kelola pemerintahan saling berhubungan satu sama lain.

Dengan keterbukaan informasi public tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas organisasi publik menjadi fenomena yang menimbulkan atas ketidakpuasan terhadap transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat adanya efektivitas tata kelola (*effective governance*) pemerintahan.

Isu lain Rendahnya tindak lanjut atas temuan pemeriksaan menciptakan risiko bahwa masalah serupa akan terus terjadi. Akibatnya, tujuan pengawasan tidak tercapai, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetap lemah. Ini menuntut perbaikan peran Inspektorat sebagai pengawas internal yang efektif. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai melalui pengawasan yang optimal. Dengan pengawasan yang baik, program-program pemerintah dapat berjalan sesuai

perencanaan dan mengurangi risiko penyimpangan.

Berdasarkan fenomena tersebut, muncul pertanyaan penting yang relevan dengan topik tesis: Apakah Inspektorat benar-benar memainkan peran strategis dalam mendorong akuntabilitas keuangan daerah? Dan apakah peran ini dimediasi atau diperkuat oleh kualitas tata kelola pemerintahan daerah itu sendiri?

Fenomena dilapangan sering terjadi temuan terkait laporan keuangan, seperti lambatnya setoran pajak, sering keterlambatan pelaporan keuangan di akhir tahun anggaran, disamping terkadang sudah di anggarakan namun tidak terrealisasi karena keterbatasan anggaran. Bahkan ada anggaran yang sudah terealisasi namun kegiatan belum terlaksana. Terjadinya pergantian bendahara yang sering menimbulkan masalah dalam laporan pertanggungjawaban. Disinilah peran dari pengasan agar tidak terjadi temuan sehingga tidak berurusan dengan aparat penegak hukum.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas keuangan serta sejauhmana peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal di Kabupaten Rokan Hilir.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Kuesioner yang disebarluaskan melalui Google form.. Pendekatan kuantitatif dipilih karena fokus penelitian adalah menguji hubungan antar variabel secara empiris dan objektif melalui data numerik. Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Teknik sampling yang di gunakan adalah total sampling yaitu keseluruhan populasi yang di jadikan sampel yang berjumlah 34 orang. Camat sekabupaten

rokan hilir 18 orang. Penghulu atau Kepala Desa sebanyak 159. Jadi total populasi dalam penelitian ini 211.

HASIL

Penelitian ini mengumpulkan data pada waktu dan sumber yang sama. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa data tersebut masih berpotensi menghasilkan *common method variance* (CMV) (Podsakoff et al., 2003, 2012). Untuk memastikan bias metode umum dapat dikendalikan, penelitian ini menggunakan *full collinearity variance inflation factors* (VIFs) untuk mengevaluasi apakah data dalam penelitian memiliki masalah CMV atau tidak (Kock, 2015).

Tabel 4.4 Hasil pengujian *full collinearity VIFs*

Kecerdasan Emosional	Kinerja	Kreativitas Kerja
2.094	2.417	2.945

Hasil (Tabel 4.4) hasil pengujian full collinearity VIFs menunjukkan bahwa Kecerdasan Emosional pada angka 2.372. Kinerja pada angka 2.376 dan Kreativitas pada angka 2.130. Masing-masing variabel memiliki nilai *full collinearity VIFs* lebih rendah dari 3.3. Dengan demikian, data dalam penelitian ini tidak berpotensi menghasilkan *common method variance* (CMV) (Kock, 2015).

Hasil pengujian *model fit and quality indices*

Tabel 4.5 menampilkan pengujian *model fit and quality indices* dalam analisis PLS pada penelitian ini meliputi *average R-square* (ARS), *average path coefficient* (APC), dan *average variance inflation factor* (AVIF). Hasil pengujian menunjukkan bahwa model cocok dengan data ARS =0.570, $P<0.001=0.553$, APC = 0.523, ($P<0.001$), AVIF =1.881. Nilai VIF yang lebih rendah dari 3.3 menunjukkan bahwa model tersebut bebas dari masalah multikolinearitas (Hair et al., 2014).

Tabel 4.5. Hasil pengujian *model fit and quality indices*

Parameter	Nilai	Rule of thumb
Average path coefficient (APC)	0.523, $P<0.001$	$p\text{-value}<0,05$
Average R-squared (ARS)	0.570, $P<0.001$	$p\text{-value}<0,05$
Average block VIF (AVIF)	1.881	$<3,3$
Tenenhaus (GoF)	0.663	$\geq 0,10$ (<i>small effect size</i>), $\geq 0,25$ (<i>Medium effect size</i>), dan $\geq 0,36$ (<i>large effect size</i>)
Q-Square coefficient Kinerja Kreatif	(Q^2) 0.619 0.529	>0 (<i>acceptable predictive model</i>)

Hasil pengujian juga menghitung indeks *Goodness of Fit* (GoF). Indeks GoF bertujuan untuk mengevaluasi kecocokan model *outer* dan *inner* pada PLS (Tenenhaus et al., 2005). Nilai batas untuk GoF adalah 0.10 (kecil), 0.25 (sedang), dan 0.36 (besar) (Wetzels et al., 2009). Nilai GoF dalam penelitian ini adalah 0.663, yaitu berada pada kategori sedang dari nilai ambang batas 0.52. Hasil ini menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini berkinerja baik (Wetzels et al., 2009). Selain itu, koefisien Q^2 pada tabel 4.5 menunjukkan nilai yang lebih besar dari nol, yang menjelaskan bahwa model memiliki nilai prediksi yang dapat diterima (O'Cass & Weerawardena, 2010).

Hasil pengujian model pengukuran

Pada analisis SEM-PLS, pengujian model pengukuran bertujuan untuk mengevaluasi validasi skala pengukuran setiap variabel (Hair et al., 2014). Evaluasi model pengukuran dilakukan dalam tiga tahap.

Tabel 4.6 Evaluasi model pengukuran reflektif

Variabel	Item	Loading	AVE	CR	α
PENGAWASAN INSPEKTORAT	X1	0.64	0.775	0.972	0.967
	X2	0.849			
	X3	0.871			
	X4	0.892			
	X5	0.923			
	X6	0.925			
	X7	0.892			
	X8	0.923			
	X9	0.925			
	X10	0.925			
AKUNTABILITAS KEUANGAN	Y1	0.84	0.764	0.958	0.948
	Y2	0.914			
	Y3	0.773			
	Y4	0.923			
	Y5	0.868			
	Y6	0.923			
	Y7	0.868			
Kreativitas kerja	M1	0.804	0.758	0.962	0.954
	M2	0.826			
	M3	0.862			
	M4	0.892			
	M5	0.912			
	M6	0.862			
	M7	0.892			
	M8	0.912			

Catatan: CR = Composite reliability, α = Cronbach alpha, AVE = *average variances extracted*,

*** signifikan pada level 0,001

Tahap pertama adalah menguji atau mengevaluasi konsistensi internal dari reliabilitas setiap variabel. Sebuah skala pengukuran variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai composite reliability (CR) dan nilai cronbach alpha (α) diatas 0,7. Hasil pada table 4.6 dapat dilihat bahwa seluruh nilai CR dan α pada setiap variabel berada diatas 0,7. Hal ini dapat dijelaskan bahwa skala pengukuran variabel dalam penelitian ini memiliki konsistensi reliabilitas yang baik.

Tabel 4.7 Hasil Loadings dan Crossloading

PENGAWASAN	AKUNTABILITAS KEUANGAN	TATA KELOLA	Type (a)	SE	P value
ANTAR	INSPEKTORAT	DAERAH			
INSPEKTORAT	KEUANGAN	DAERAH			
DAERAH	KEUANGAN	DAERAH			
DAERAH	KEUANGAN	DAERAH			
DAERAH	KEUANGAN	DAERAH			
DAERAH	KEUANGAN	DAERAH			
DAERAH	KEUANGAN	DAERAH			
DAERAH	KEUANGAN	DAERAH			
DAERAH	KEUANGAN	DAERAH			

X1	0.64	0.157	-0.079	Reflect	0.059	<0.001
X2	0.849	-0.03	-0.014	Reflect	0.057	<0.001
X3	0.871	0.071	-0.07	Reflect	0.056	<0.001
X4	0.892	0.006	0.046	Reflect	0.056	<0.001
X5	0.923	-0.033	-0.109	Reflect	0.056	<0.001
X6	0.925	-0.031	0.087	Reflect	0.056	<0.001
X7	0.892	0.006	0.046	Reflect	0.056	<0.001
X8	0.923	-0.033	-0.109	Reflect	0.056	<0.001
X9	0.925	-0.031	0.087	Reflect	0.056	<0.001
X10	0.925	-0.031	0.087	Reflect	0.056	<0.001
Y1	-0.001	0.84	0.089	Reflect	0.057	<0.001
Y2	0.023	0.914	0.084	Reflect	0.056	<0.001
Y3	-0.118	0.773	0.272	Reflect	0.057	<0.001
Y4	-0.121	0.923	-0.022	Reflect	0.056	<0.001
Y5	0.17	0.868	-0.185	Reflect	0.056	<0.001
Y6	-0.121	0.923	-0.022	Reflect	0.056	<0.001
Y7	0.17	0.868	-0.185	Reflect	0.056	<0.001
Z1	0.219	-0.109	0.804	Reflect	0.057	<0.001
Z2	0.191	0.319	0.826	Reflect	0.057	<0.001
Z3	-0.041	-0.192	0.862	Reflect	0.056	<0.001
Z4	-0.236	0.191	0.892	Reflect	0.056	<0.001
Z5	0.087	-0.102	0.912	Reflect	0.056	<0.001
Z6	-0.041	-0.192	0.862	Reflect	0.056	<0.001
Z7	-0.236	0.191	0.892	Reflect	0.056	<0.001
Z8	0.087	-0.102	0.912	Reflect	0.056	<0.001

Dari dua pengujian: (1) uji validitas konvergen; (2) uji validitas diskriminan. Pada pengujian validitas konvergen, setiap item pertanyaan dikatakan valid apabila memiliki nilai *loading* diatas sama dengan 0,50 (Chin, 2010). Pada table 4.6 dapat dilihat bahwa seluruh item pertanyaan yang ada pada penelitian ini memiliki nilai *loading* diatas 0,50

Selain itu, pengujian validitas konvergen juga dapat dilihat dari nilai *average variances extracted* (AVE). Sebuah variabel dikatakan valid secara konvergen apabila memiliki nilai AVE diatas sama dengan 0,50 (Chin, 2010). Pada

table 4.6 dapat dilihat bahwa nilai AVE setiap variabel adalah diatas 0,50. Berdasarkan kedua hasil tersebut (nilai *loadings* dan AVE), maka dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan yang ada pada skala pengukuran variabel pada penelitian valid secara konvergen.

Table 4.9. Hasil Pengujian Hipotesis.

Model 1: Full Model

Pengaruh Langsung		
Pengawasan Inspektorat → Akuntabilitas Keuangan	0.063, P<0.001	Signifikan
Pengawasan Inspektorat → Tata Kelola Pemerintahan	0.058, P<0.001	Signifikan
Akuntabilitas Keuangan → Tata Kelola Pemerintahan	0.059, P<0.001	Signifikan
Model 2: Pengaruh Tidak Langsung		
Akuntabilitas Keuangan → Tata Kelola Pemerintahan → Akuntabilitas Keuangan	0.442, <0.001	Signifikan

signifikan pada level 0,001.

Hasil pengujian model struktural Setelah melakukan evaluasi terhadap model pengukuran, penelitian ini selanjutnya mengevaluasi model struktural. Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa evaluasi pada model struktural bertujuan untuk menguji seluruh hipotesis yang telah diajukan. Selanjutnya, Tabel 4.9, Gambar 4.4 dan Gambar 4.5. mengungkapkan nilai koefisien jalur yang dihasilkan oleh analisis SEM-PLS dari model penelitian yang diusulkan dalam penelitian ini.

Hipotesis pertama (H1) Pengawasan Inspektorat Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas keuangan. Hasil pada table 4.9 Tabel tersebut menunjukkan bahwa tanpa variabel mediasi, secara langsung pengawasan Inspektorat secara positif dan Signifikan Akuntabilitas Keuangan dengan angka statistik (0.063, P<0.001)

Hipotesis kedua (H2) memprediksi bahwa Pengawasan Inspektorat Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Tata kelola Keuangan. Hasil pada table 4.9 dan gambar 4.5 menunjukkan bahwa hipotesis ini didukung secara statistik (0.058, P<0.001). Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel Pengawasan Inspektorat secara positif

meningkatkan Tatakelola Pemerintahan.

Hipotesis ketiga (H3) memprediksi bahwa Tata Kelola Pemerintahan berpengaruh Positif dan Sifnifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hasil pada table 4.9 dan gambar 4.5 menunjukkan bahwa hipotesis ini didukung secara statistik ($\beta = 0.275$, $p < 0.001$). Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel Tata Kelola Pemerintahan secara positif menyebabkan Akuntabilitas Keuangan.

Hipotesis ketempat (H4) memprediksi bahwa Tata Kelola Pemerintahan berpengaruh Positif dan Sifnifikan dalam memediasi hubungan Pengawasan Inspektorat terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hasil pada table 4.9 dan gambar 4.5 menunjukkan bahwa hipotesis ini didukung secara statistik (0.442, <0.001). Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel Tata Kelola secara positif memediasi hubungan Pengawasan Inspektorat terhadap Akuntabilitas keuangan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pengawasan Inspektorat, tata kelola pemerintahan, dan akuntabilitas keuangan. Berdasarkan hasil analisis SEM-PLS pada Tabel 4.9 dan Gambar 4.5, seluruh hipotesis yang diajukan didukung secara statistik. Temuan ini memberikan pemahaman penting mengenai bagaimana peran pengawasan internal dan tata kelola yang baik dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintahan daerah.

H1: Pengaruh Pengawasan Inspektorat terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan ($\beta = 0.063$; $p < 0.001$). Temuan ini sejalan dengan teori pengawasan internal dan akuntabilitas publik yang menyatakan bahwa keberadaan pengawasan

yang efektif akan meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik. Artinya, ketika fungsi pengawasan Inspektorat berjalan dengan baik, maka pelaporan dan penggunaan anggaran akan lebih sesuai dengan aturan dan prinsip akuntabilitas.

H2: Pengaruh Pengawasan Inspektorat terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Hipotesis kedua juga didukung secara statistik ($\beta = 0.058$; $p < 0.001$), menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat secara langsung dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif dan konstruktif dalam membentuk sistem administrasi yang lebih tertib, transparan, dan partisipatif. Dengan kata lain, pengawasan berkontribusi dalam membangun budaya tata kelola yang baik.

H3: Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan ($\beta = 0.275$; $p < 0.001$). Hal ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas benar-benar memiliki pengaruh nyata terhadap kualitas laporan dan pengelolaan keuangan publik. Pemerintahan yang dikelola dengan baik secara otomatis akan lebih mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya kepada publik.

H4: Tata Kelola Pemerintahan sebagai Mediator

Hipotesis keempat menguji peran tata kelola pemerintahan sebagai variabel mediasi antara pengawasan Inspektorat dan akuntabilitas keuangan. Hasil menunjukkan bahwa pengaruh tersebut diperkuat secara signifikan melalui peran tata kelola ($\beta = 0.442$; $p < 0.001$). Ini menunjukkan bahwa walaupun pengawasan secara langsung

berpengaruh terhadap akuntabilitas, efeknya akan jauh lebih besar jika didukung oleh sistem tata kelola pemerintahan yang efektif. Dengan demikian, tata kelola menjadi jalur penting dalam mengalirkan dampak pengawasan terhadap peningkatan akuntabilitas.

Interpretasi dan Implikasi

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan beberapa poin penting:

1. Pengawasan Inspektorat bukan hanya sekadar alat kontrol, tetapi juga motor penggerak reformasi birokrasi melalui penguatan tata kelola.
2. Tata Kelola Pemerintahan berperan sebagai kunci keberhasilan dalam membangun akuntabilitas keuangan secara sistematis.
3. Sinergi antara pengawasan dan tata kelola merupakan kombinasi strategis yang perlu dipertahankan dan diperkuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat fungsi Inspektorat dan menerapkan prinsip-prinsip good governance secara konsisten agar akuntabilitas keuangan dapat tercapai secara optimal

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian model struktural menggunakan analisis SEM-PLS, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait pengaruh Kecerdasan Emosional, Kreativitas Kerja, dan Kinerja Pegawai pada ASN di Kabupaten Rokan Hilir:

1. Kecerdasan Emosional Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja Pegawai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai,

dengan nilai koefisien $\beta = 0.664$ dan $p < 0.001$. Artinya, semakin tinggi tingkat kecerdasan emosional yang dimiliki pegawai, maka semakin tinggi pula kinerja yang ditampilkan dalam lingkungan kerja.

2. Kecerdasan Emosional Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kreativitas Kerja
Kecerdasan emosional juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kreativitas kerja pegawai, dengan nilai koefisien $\beta = 0.719$ dan $p < 0.001$. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan pegawai dalam mengelola emosi, empati, dan hubungan sosial turut mendorong lahirnya ide-ide inovatif dan solusi kreatif dalam penyelesaian tugas.
3. Kreativitas Kerja Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja Pegawai
Kreativitas kerja memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja, dengan koefisien $\beta = 0.275$ dan $p < 0.001$. Pegawai yang menunjukkan kreativitas tinggi cenderung bekerja lebih efektif, produktif, dan mampu menghadirkan pendekatan kerja yang lebih adaptif terhadap perubahan.
4. Kreativitas Kerja Memediasi Hubungan antara Kecerdasan Emosional dan Kinerja
Penelitian ini juga menemukan bahwa kreativitas kerja memediasi secara positif dan signifikan hubungan antara kecerdasan emosional dan kinerja pegawai, dengan nilai koefisien $\beta = 0.197$ dan $p < 0.001$. Artinya, kecerdasan emosional tidak hanya berdampak langsung terhadap kinerja, tetapi juga secara tidak langsung melalui peningkatan kreativitas kerja

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, M. R. (2020a). Metode Penelitian: Perspektif Sains Organisasi. Pekanbaru, Riau: Unilak Press.
- Abdillah, M. R. (2020b). Effects of Altruistic Leadership on Knowledge Hiding

among Subordinates: Testing a Dual Mediation Mechanism. (Doctoral dissertation, Da-Yeh University, Taiwan). Retrieved from:

<https://hdl.handle.net/11296/g3e8ug>

- Abdillah, M. R., Anita, R., & Anugerah, R. (2016). Dampak iklim organisasi terhadap stres kerja dan kinerja karyawan. *Jurnal Manajemen*, 20(1), 121-141.
- Anita, R., Abdillah, M. R., & Zakaria, N. B. (2021). Authentic leader and internal whistleblowers: testing a dual mediation mechanism. *International Journal of Ethics and Systems*, 37(1), 35-52. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2020-0036>
- Aprillia, Y., & Usman, F. (2023). Pengaruh peran pengawasan atas akuntabilitas keuangan dan pengawasan atas kualitas pengendalian intern terhadap tata kelola pemerintah daerah. *Jurnalku*, 3(4), 408-425.
- Berg, E., & Arif, M. R. (2024). Peran Inspektorat Daerah Sebagai Konsultansi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. *Manor: Jurnal Manajemen dan Organisasi Review*, 6(2), 315-329.
- Dewi, N. F. (2024). Peran Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Profiet*, 5(1), 290-301.
- Fadhli, A., Alam, S., & Rajab, M. (2025). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat ota Kendari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Kendari. *PAMARENDA: Public*

- Administration and Government Journal*, 4(3), 425-433.
- Faozan, H. (2010). Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang Menimbulkan Pembangunan Daerah:: Haris Faozan 297 *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume VII No. 4 Desember 2010 Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik Dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Yang Menimbulkan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 7(4), 06-06.
- Fujilestari, N. A., Rochaeni, A., & Ramdani, W. (2025). Memperkuat Pengawasan: Metakan Kedudukan Inspektorat Dalam Menjamin Akuntabilitas Dan Integritas Pada Era Transparansi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 314-324.
- Feng, L., Chen, Z., & Chen, H. (2022). Does the central environmental protection inspectorate accountability system improve environmental quality?. *Sustainability*, 14(11), 6575
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA- Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Kiat, M. S., Madubun, J., & Selanno, H. (2025). Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 9(2), 1156-1163.
- Masdar, R., Furqan, A. C., Masruddin, M., & Meldawaty, L. (2021). The role of transparency and professional assistance in regional financial management in the Indonesian regional governments. *Journal of Public Affairs*, 21(3), e2666.
- Pratolo, S. (2008). Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Hubungannya Dengan Perwujudan Keadilan Dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur Dan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 9(2), 108-124.
- Rahmah, A., & Helmi, R. F. (2025). Pengaruh Pengawasan Keuangan Oleh Inspekda Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Nagari Melalui Pemanfaatan TI Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 13-13.
- Rizal, S. (2023). Pengaruh Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa: (Studi Kasus Pada Desa Joharan Kecamatan Putra Rumbia Lampung Tengah). *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(1), 314-329.
- Riswati, R. (2021). Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi Di Indonesia. *Jurnal Media Birokrasi*, 1-15.
- Suripatty, P. I., & Edyanto, E. (2023). Institutionalizing local government accountability: a case of Nabire, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(3), 440-453.
- Rustan, D. M. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aktivitas Pengendalian, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Inspektorat. *Jurnal*

- Pelopori Manajemen Indonesia (JPMI)*, 2(4), 375-389.
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). *Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12 (1), 50–58.
- Yaumi, S. (2021). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Inspektorat Pemkab Lamongan). *Jurnal Ekbis*, 22(1), 88-106